

UPAYA PEMERINTAH DESA JERORA SATU DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS DI ERA REFORMASI 4.0 PADA TAHUN 2020

Fusnika, Septha Suseka dan Aprillianti Bunga Lestari

STKIP Persada Khatulistiwa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Sintang

Email: fusnika804@gmail.com, cekgupapakebenaran@gmail.com, aprilla.8899pkn@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the efforts, the role of facing obstacles, and the form of fostering the Jerora Satu Village Government in participating with democratic communities in the era of reform 4.0. The research method used in this research is descriptive qualitative and a form of case study research. Data collection techniques using observation, interview, and documentation techniques. The research results and conclusions show that: 1) the form of efforts made is to accommodate the aspirations of the people of Jerora Satu Village and by holding deliberations so as to realize the priorities of the village community, 2) the mindset factor of the people of Jerora One Village is not completely apathetic and the government support factor in the village is already This can be seen from the control carried out by a socialization from non-governmental organizations. 3) the form of guidance is socialization to get the attention of the people of Jerora Satu Village to participate in democracy to bring together every viewpoint between the community and the Village Government of Jerora One Suggestion for 1) Village government and Jerora Satu Village officials so that they can establish good relationships and will improve their approach to the community Jerora One Village 2) Jerora Satu Village community in order to increase their active participation and become a society that is sensitive to democracy. 3) the researcher can further examine the efforts of the village government in realizing a democratic society.

Keywords: *Village Government, Democratic Society, Reform Era*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya, peranan menghadapi hambatan, dan wujud pembinaan Pemerintah Desa Jerora Satu dalam berpartisipasi dengan masyarakat yang berdemokratis di era reformasi 4.0. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dan bentuk penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa : 1) bentuk upaya yang dilakukan adalah menampung aspirasi masyarakat Desa Jerora Satu dan dengan cara mengadakan musyawarah sehingga mewujudkan prioritas masyarakat desa, 2) faktor pola pikir masyarakat Desa Jerora Satu tidak sepenuhnya apatis dan faktor dukungan pemerintah di desa sudah baik ini terlihat dari control yang dilakukan sebuah sosialisasi dari lembaga swadaya masyarakat. 3) wujud pembinaannya adalah sosialisasi untuk mendapatkan perhatian masyarakat Desa Jerora Satu berpartisipasi dalam demokrasi untuk mempertemukan setiap pandangann antara masyarakat dan Pemerintah Desa Jerora Satu Saran untuk 1) Pemerintah desa dan aparat Desa jerora satu supaya dapat menjalin hubungan yang baik dan akan meningkatkan pendekatan kepada masyarakat Desa Jerora satu 2) masyarakat Desa Jerora Satu agar dapat meningkatkan partisipasi turut aktif, serta menjadi masyarakat yang peka terhadap demokrasi. 3) peneliti dapat meneliti luas lagi terkait upaya pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, Masyarakat Demokratis, Era Reformasi

Pendahuluan

Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Desa mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Desa dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang.

Masyarakat mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintah desa tersebut, maka telah dicabut produk hukum setingkat Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri, dan Intruksi Mendagri yang diganti dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Peraturan Pemerintah diterbitkan untuk menjabarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Selain sudah sangat

ditunggu-tunggu, keberadaan peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005 ini juga amat strategis. Kestrategisan Peraturan Pemerintah terletak pada substansi materi yang dikandungnya. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 mengatur tentang desa, dimana pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan terbawah secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Desa merupakan instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan Tindakan yang ditetapkan dan dilakukan oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintahan desa yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang memungkinkan untuk diuji melalui Pengadilan diperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan maupun sebagian dapat terwujud. Peraturan pemerintah desa pada dasarnya adalah upaya untuk membangun prinsip-prinsip

pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak administrasi yang demokratis, objektif, dan professional dalam rangka menciptakan keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat kita ketahui bahwa pemerintah daerah Jerora Sartu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis terdapat peran yang sangat besar dan maknanya yang juga sangat dalam bagi kehidupan masyarakat Jerora Satu di era reformasi ini. Masyarakat jerora satu masih kurang memberikan sebuah dukungan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan sebuah demokrasi yang baik dan juga terstruktur bagi para masyarakat jerora satu kecenderungan pemahaman masyarakat Desa Jerora Satu terkait menjalankan sebuah demokrasi yang masih belum sepenuhnya baik sebagian besar masyarakat demokratis secara garis besar hanyalah sebuah kebebasan belaka tanpa mengetahui lebih jelas terkait makna demokrasi yang baik itu seperti apa di masa reformasi seperti sekarang dan sebagian nya lagi masyarakat Desa Jerora Satu acuh tak acuh terhadap demokratisasi yang baik seperti apa.

Sehingga disini masih perlu nya sebuah dukungan atau pun kerja sama

antara pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk terwujudnya demokrasi yang baik di era reformasi terlebih lagi untuk para pemilih yang baru pertama kali melakukan demokratisasi harus diberikan pemahaman dasar supaya mereka paham seperti apa demokratisasi yang baik di era reformasi ini pada saat di sekolah mereka pasti sudah mendapatkan ilmu terkait tentang demokratisasi sehingga yang harus mereka lakukan dimasyarakat adalah praktek langsung yang langsung dibimbing oleh pemerintah desa jerora satu. Maka dari itu upaya pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat yang peduli pada demokrasi pemerintah wajib memberikan pengarahan supaya masyarakat jerora satu ikut berpartisipasi menjalankan dan juga akan sadar akan pentingnya demokrasi dalam hidup bermasyarakat di era reformasi. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Upaya Pemerintah Desa Jerora Satu Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis Di Era Reformasi 4.0 Tahun 2020.

Metode

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk

menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian metode kualitatif yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif dari definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena jika memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebagai yang lazim digunakan dalam penelitian klasik,

maka sangat tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan yang ada di lapangan. Selain itu hanya manusia sebagai alat sajarah yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya dan hanya manusia lah yang mampu memahami kaitan kenyataan di lapangan.

Dari kajian tentang definisi tersebut dapatlah disintesis bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012:6).

Dalam Sugiyono (2015:9) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dinamakan sebagai metode baru, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivistik. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi

yang alamiah (*natural setting*) disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Moeleong, 2006:6).

Data empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian data berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik selama penelitian berlangsung. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu

keadaan, huruf, angka, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa peneliti gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Aprata Desa Jerora Satu, Sekretari Desa Jerora Satu, Kepala Desa Jerora Satu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jerora Satu serta Masyarakat Desa Jerora Satu.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumentasi dan angket merupakan sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara dan teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.

Dalam penelitian kualitatif alat pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

Dalam Burhan (2011: 257-261). Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan seperti apa yang dikemukakan oleh Burgess dengan “strategi penelitian

ganda” atau seperti yang dikatakan oleh Denzim dengan triangulasi. Islitah penggabungan metode ini dikenal lebih akrab dikalangan pemula dengan istilah meta-metode (*mix-method*), yaitu metode campuran, dimana metode kualitatif dan kuantitatif digunakan bersama-sama dalam sebuah penelitian.

Dalam Sugiyono (2015:241) teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Pembahasan Dan Hasil

1. Pembahasan

a. Pemerintahan Desa

Langkah konkrit dalam upaya pembangunan Desa antara lain berupa lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan salah satu bentuk perkembangan sistem hukum di Indonesia, dimana hal ini terwujud karena adanya keinginan untuk

membentuk suatu undang-undang tersendiri yang mengatur tentang desa. Salah satu tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 pasal 5 ayat 1 tentang Desa adalah guna memaksimalkan fungsi Pemerintah Desa agar mampu menjalankan peran utamanya, yaitu sebagai penyelenggara Pemerintah Desa, pelaksana Pembangunan Desa, pembina kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pada era reformasi diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya dibuat secara terpisah undang-undang yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan keleluasaan kepada desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memuat tentang kewenangan desa.

Dari kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa di mana desa dapat mandiri dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

b. Masyarakat Demokratis

Definisi “masyarakat” sangat beragam. Dalam telaah sosiologi, biasanya definisi dibuat berdasarkan hasil penelitian ataupun dari pengalaman sehari-hari. Eko. H,dkk (2015:1) mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan yang tetap dari orang-orang yang hidup di daerah tertentu dan bekerja sama dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebudayaan yang sama untuk mencapai kepentingan yang sama. Menurut Bambang (2014:38) Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Manusia nusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya, sebuah keniscayaan manusia bisa hidup secara individual dalam lingkungannya.

Para ilmuwan di bidang sosial sepakat tidak ada definisi tunggal tentang masyarakat dikarenakan sifat

manusiaseselalu berubah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, pada ilmuwan tersebut memberikan definisi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Adapun menurut Bambang (2014:39) mengemukakan bahwa ciri-ciri kehidupan masyarakat adalah:

- a) Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu
- b) Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama
- c) Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan
- d) Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan saling terkait antara satu dengan lainnya.

Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Kehidupan sebuah masyarakat merupakan sebuah sistem sosial di mana bagian-bagian yang ada di dalamnya saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan menjadikan bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan yang terpadu. Manusia akan bertemu dengan manusia lainnya dalam sebuah masyarakat dengan peran yang berbeda-beda, sebagai contoh ketika seseorang

melakukan perjalanan wisata, pasti kita akan bertemu dengan sebuah sistem wisata antara lain biro wisata, pengelola wisata, pendamping perjalanan wisata, rumah makan, penginapan dan lain-lain.

c. Implementasi Masyarakat Demokratis

Sebuah ide dan konsep akan menjadi utuh ketika diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik demokrasi di masyarakat sangat beragam dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Sebagaimana pemahaman demokrasi yang sangat beragam, dalam masyarakat, bagaimana demokrasi diwujudkan juga memiliki keragaman yang banyak. Pemahaman warga mengenai bagaimana demokrasi dijalankan dalam kehidupan, diklasifikasikan kedalam beberapa konsep utama.

Menurut (Arif S 2013 : 10-11) Praktik demokrasi di masyarakat sangat beragam dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Sebagaimana pemahaman demokrasi yang sangat beragam, dalam masyarakat, bagaimana demokrasi diwujudkan juga memiliki keragaman yang banyak. Pemahaman warga mengenai bagaimana demokrasi dijalankan dalam kehidupan,

diklasifikasikan kedalam beberapa konsep utama.

Pertama adalah mereka yang memahami praktik demokrasi sebagai sikap dan perilaku dalam kehidupan sosial dan politik. Kedua adalah mereka yang memahami penerapan demokrasi sebagai kegiatan partisipasi dalam kegiatan sosial politik. Ketiga adalah mereka yang memahami pelaksanaan demokrasi sebagai mematuhi aturan atau mendukung kebijakan pemerintah. Ada juga berbagai pemahaman lain yang cukup beragam, yang intinya adalah berujung pada sebuah kondisi yang diharapkan atau penilaian terhadap kondisi saat ini. Demokrasi lokal bersandar pada bagaimana sikap dan perilaku menghargai perbedaan dan keberadaan pihak lain dijunjung, partisipasi yang tinggi dalam lingkungan serta mematuhi aturan main yang telah disepakati. Kenyataannya konsep nilai dan perilaku demokrasi selalu berbenturan dengan nilai dan perilaku nondemokrasi. Hadirnya nilai baru yang mendukung maupun menghambat demokrasi juga berinteraksi dengan nilai lama yang mendukung atau menghambatnya. Demokrasi juga dimaknai sebagai proses transaksi politik. Wujud nyata demokrasi di

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dalam relasi sosial.

2. Hasil

a. Upaya Pemerintah Desa Jerora Satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis di era reformasi 4.0

Upaya Pemerintah Desa Jerora Satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis sudah berkerjasama dengan Badan permusyawaratan desa dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, dimana dalam hal ini upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Jerora Satu beserta dengan aparatnya sudah berjalan dengan baik. Suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jerora Satu mewujudkan masyarakat yang demokratis dapat menjadi ukuran untuk keberhasilan suatu upaya atau pun suatu pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan selama peneliti di lapangan, dalam hal ini upaya Pemerintah Desa Jerora Satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis di era reformasi 4.0 dalam menampung pendapat masyarakat jerora satu sudah dikatakan cukup baik ini terlihat ketika pelaksanaan musyawarah desa yang diadakan masyarakat mengajukan pertanyaan dan memberikan

pendapat atau bahkan sanggahan dan selalu ditampung oleh pemerintah desa jerora satu.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui karena begitu pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses upaya Pemerintah Desa Jerora Satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga masyarakat terlebih dahulu diberikan dasar yang kokoh agar tingkat partisipasi yang diberikan maksimal bias maksimal. Menempatkan masyarakat sebagai subjek untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis memberikan arti bahwa masyarakat diposisikan sebagai sala satu pilar penting dan strategis disamping Pemerintah Desa Jerora Satu dan juga swasta. Posisi ini juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana masyarakat yang demokratis, tetapi disamping itu masyarakat juga berperan sebagai perencana dan pengontrol berbagai upaya ataupun program yang direncanakan oleh pemerintah desa jerora satu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan selama dilapangan, masyarakat Desa Jerora Satu sudah sangat dilibatkan yakni dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

Desa Jerora Satu masyarakat Desa Jerora Satu juga ikut senang dengan terlibat nya mereka dalam upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa jerora satu.

b. Peranan Pemerintah Desa Jerora Satu menghadapi hambatan dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis di era reformasi 4.0

Pola pikir masyarakat yang masih apatis yang merasa upaya Pemerintah Desa Jerora Satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis merupakan upaya yang tak terlalu penting yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Jerora Satu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa jerora satu. Pola pikir tertutup, pasif merupakan faktor yang menghambat partisipasi masyarakat desa jerora satu. Seperti yang diungkapkan oleh Ibori (2009: 3) menyatakan seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan diri dan egonya, yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan atau tugas saja, dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaanya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan selama di lapangan, faktor pola pikir masyarakat yang ada di Desa Jerora Satu tidak sepenuhnya apatis dengan adanya upaya Pemerintah Desa Jerora Satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis, tidak sedikit masyarakat yang turut berpartisipasi, sedangkan yang tidak berpartisipasi hanya sekelompok kecil saja ini disebabkan oleh masyarakat yang masih belum sepenuhnya mengerti tentang upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jerora Satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis dan tingkat pendidikan yang masih rendah, mengakibatkan masyarakat bersifat tidak mau tahu atau apatis dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa jerora satu.

Faktor pemerintah sangat berperan terhadap upaya mewujudkan masyarakat Desa Jerora Satu yang demokratis, tidak dapat diungkiri tanpa adanya dorongan dari pemerintah, masyarakat tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan demokratis yang dilakukan oleh pemerintah desa jerora satu. Kegiatan demokratis di desa dapat berupa berbagai musyawarah desa, rapat desa dan kegiatan lainnya yang

dilakukan di wilayah desa dengan menggunakan alat-alat yang ada dari pemerintah desa jerora satu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan selama di lapangan, faktor dukungan pemerintah di desa sudah baik ini terlihat dari control yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jerora Satu terhadap masyarakat yang demokratis yang dilaksanakan dan sudah sangat efektif karena diadanya sebuah sosialisasi dari lembaga swadaya masyarakat.

c. Wujud Pembinaan Pemerintah Desa Jerora Satu dalam Berkontribusi dengan Masyarakat yang Demokratis di Era Reformasi 4.0

Wujud pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Jerora Satu berkontribusi dengan masyarakat yang demokratis di era reformasi 4.0 merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola masyarakat nya agar lebih baik dan dapat berkontribusi sesuai dengan harapan pemerintah desa. Kegiatan pembinaan untuk masyarakat Desa Jerora Satu merupakan wujud pembinaan dari pemerintah desa selain menjadi lebih baik juga untuk membantu

pemerintah desa dalam memajukan desa jerora satu.

Sosialisasi tidak terlepas dari yang namanya mempengaruhi seseorang pada sikap demokratisnya, dimana seseorang individu atau pun kelompok dalam masyarakat terkhususnya masyarakat Desa Jerora Satu mampu dan memungkinkan menjadi masyarakat yang demokratis tersebut dengan melalui agen-agen sosialisasi yang tidak lain adalah aparat pemerintah desa jerora satu, agen sosialisasi ini mempengaruhi masyarakat. Aparat pemerintah desa dijadikan sebagai agen sosialisasi karena masih dianggap penting bagi masyarakat pengaruh pemerintah sangat mempengaruhi pola pikir dari masyarakat sendiri, masyarakat juga berfikir bahwa pemerintah desa masih memperdulikan rakyatnya, tidak hanya membutuhkan masyarakat disaat mereka butuh.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan selama di lapangan, bahwa sosialisasi adalah salah satu wujud pembinaan yang baik untuk dapat mendapatkan perhatian masyarakat Desa Jerora Satu dan dapat berkontribusi dengan Pemerintah Desa Jerora Satu dalam membangun Desa

Jerora Satu dengan masyarakatnya ikut terlibat dan memberikan aspirasinya.

Partisipasi adalah kegiatan seseorang atau kelompok masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan berdemokrasi, berpartisipasi dalam kegiatan berdemokrasi secara sukarela dari warga masyarakat melalui bagaimana mereka mengambil bagian dalam proses kegiatan demokrasi yang tujuan untuk mengaktifkan masyarakat makin aktif berpartisipasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan selama di lapangan, keikutsertaan masyarakat Desa Jerora Satu dalam berpartisipasi dalam berdemokrasi sangat baik dikarenakan partisipasi masyarakat Desa Jerora Satu dengan cara secara langsung dilingkungan pemerintah desa jerora satu. Masyarakat Desa Jerora Satu dalam berpartisipasi dalam berdemokrasi adalah untuk mempertemukan setiap pandangannya antara masyarakat Desa Jerora Satu dan setiap aparat Pemerintah Desa Jerora Satu untuk membentuk masyarakat demokrasi di Desa Jerora Satu.

Simpulan

Upaya Pemerintah Desa Jerora Satu dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis di era reformasi 4.0. Setelah

melaksanakan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Jerora Satu sudah bekerja dengan baik dalam menggerakkan masyarakatnya dalam kegiatan demokrasi yang diadakan, meskipun sudah maksimal tetapi masih ada sebagian kecil masyarakat Desa Jerora Satu yang masih belum mau ikut berpartisipasi dan perlu ditingkatkan lagi upaya-upaya yang diadakan oleh Pemerintah Desa Jerora Satu seperti musyawarah desa dan juga rapat desa.

Peranan Pemerintah Desa Jerora Satu menghadapi hambatan dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis di era reformasi 4.0. setelah melaksanakan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Jerora Satu dalam menghadapi hambatan yaitu faktor penghambat yaitu disebabkan oleh sebagian kecil masyarakat desa jerora pola pikirnya yang masih apatis dikarenakan lebih mementingkan pekerjaannya dari pada upaya atau pun kegiatan yang demokrasi oleh pemerintah desa jerora, sedangkan faktor pendukungnya ialah berasal dari Pemerintah Desa Jerora Satu yang selalu mendorong masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi sebagai bentuk dari demokrasi dan Pemerintah Desa Jerora

Satu selalu melakukan kontrol masyarakatnya melalui ketua RT dan kepala dusun-dusun di desa jerora satu.

Wujud Pembinaan Pemerintah Desa Jerora Satu dalam Berkontribusi dengan Masyarakat yang Demokratis di Era Reformasi 4.0. Setelah melaksanakan penelitian di lapangan dapat diketahui bahwa wujud pembinaan yang diberikan Pemerintah Desa Jerora Satu dalam wujud sosialisasi dan juga partisipasi. Sosialisasi akan memberikan suatu pengaruh kepada masyarakat Desa Jerora Satu dan dapat merubah pola pikir masyarakat dalam memahami kegiatan demokrasi yang diadakan. Sedangkan kegiatan pembinaan partisipasi membawa masyarakat untuk mengikuti serta dalam kegiatan Desa Jerora Satu dengan secara langsung dapat mempertemukan dan menyatukan pandangan dalam setiap masyarakat Desa Jerora Satu menjadi sebuah kesatuan dari seluruh masyarakat desa jerora satu.

Daftar Pustaka

- Arif, S. 2013. "Pemaknaan Demokrasi di Era Reformasi (Opini Masyarakat Jawa Tengah Terhadap Demokrasi Saat Ini)" *Politika*, Vol. 4, No. 2, Hal 10-11.
- Bambang. T. 2014. "Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial"

- Geoedukasi Volume III Nomor 1, Maret. Hal.38-39.
- Cholisin. 2007. "Karakteristik Warga Negara yang Demokratis dalam Perspektif Demokrasi Pancasila". *Jurnal Civics*, Vol 4, No 2. Hal 14-15
- Deigy I T. 2015. "Efektivitas Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa Tempang Tiga Kecamatan Langowan Utara Kabupaten Minahasa". *Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado.Hal : 5-6.*
- Eko, N. K. 2012. "Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah". *Jurnal Rechts Vinding* vol. 1 No. 3 hal : 398-399.
- Hartuti P. 2004. "Demokrasi Indonesia: dari Masa ke Masa". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.2. Hal.121-122.
- Herlina.Yasin, N. dan Surahman. 2017. "Eksistensi Otonomi Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Jurnal Katalogis*, Volume 5 Nomor 5. Hal 112-113.
- Kurniawan, MD, Suwirta,A. 2016. "Ideologisasi Konsep Reformasi dalam Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah di Sekolah" *MIMBAR PENDIDIKAN: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 1(1) Maret. Hal.60-61.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2000." *Kebhinnekaan Masyarakat di Indonesia Suatu Problematika Filsafat Kebudayaan*".Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Makhfudz. 2018. "Demokrasi di Era Reformasi" *Buletin Hukum dan Keadilan* Vol 2, No. 8b, Hal. 73-74.
- M.Ratna.J.N, dkk. 2010. "Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan (Studi Kasus pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Kota Blitar)" *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 4, Hal. 688-689.
- Narwoko.Dkk. 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nugroho H. 2012. "Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 1 No.1.Hal.4-6.
- Salam, Aprinus. 2007. "Perubahan Sosial dan Pertanyaan tentang Kearifan Lokal". *Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibda'*, 5 (2): Hal. 258-259.
- Soedarso. 2010. "Masyarakat Demokratis Menurut Alexis De Tocqueville (1805-1859)" *Jurnal Sosial Humaniorah*, Vol 3 No.1, Juni. Hal 52-53.
- Sri, U. B. P. 2015 ." Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Serdang". *Skripsi*.Medan: Universitas Medan Area.